

# LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

## DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022



## PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023



VALUE ADDITION





**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jalan Sutan Syahrir No. 16 Kotak Pos 1016 Telp. (0561) 732521 Fax. (0561) 766073

**PONTIANAK**

Website : <http://dislautkan.kalbarprov.go.id>

e-mail : [admin@dislautkan.kalbarprov.go.id](mailto:admin@dislautkan.kalbarprov.go.id)

Kode Pos : 78116 A

---

**LAPORAN KINERJA**  
**PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN 2022**

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2022. Laporan Kinerja ini merupakan tahun 4 (empat) pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat. Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja dan pelaksanaan secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.



Harapan kami Laporan Kinerja ini dapat memberi manfaat dan masukan bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Pontianak, Januari 2022

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Kalimantan Barat

Ir. MUHAMMAD MUNSIF, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19630710 198903 1 023





## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. GAMBARAN UMUM .....	1
1. Pendahuluan .....	1
2. Susunan Organisasi .....	2
3. Tugas Pokok dan Fungsi .....	3
4. Sumber Daya Aparatur (SDA) .....	6
5. Sumber Daya Keuangan .....	7
6. Sarana dan Prasarana .....	7
B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) .....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	12
A. RENSTRA .....	12
1. Visi .....	13
2. Misi .....	14
3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta indikator kinerja Utama .....	15
B. PERJANJIAN KINERJA .....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	20
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	20
B. REALISASI ANGGARAN .....	47
BAB IV PENUTUP .....	58
LAMPIRAN – LAMPIRAN .....	60



## B A B. I

### PENDAHULUAN

#### A. GAMBARAN UMUM

##### 1. Pendahuluan

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi





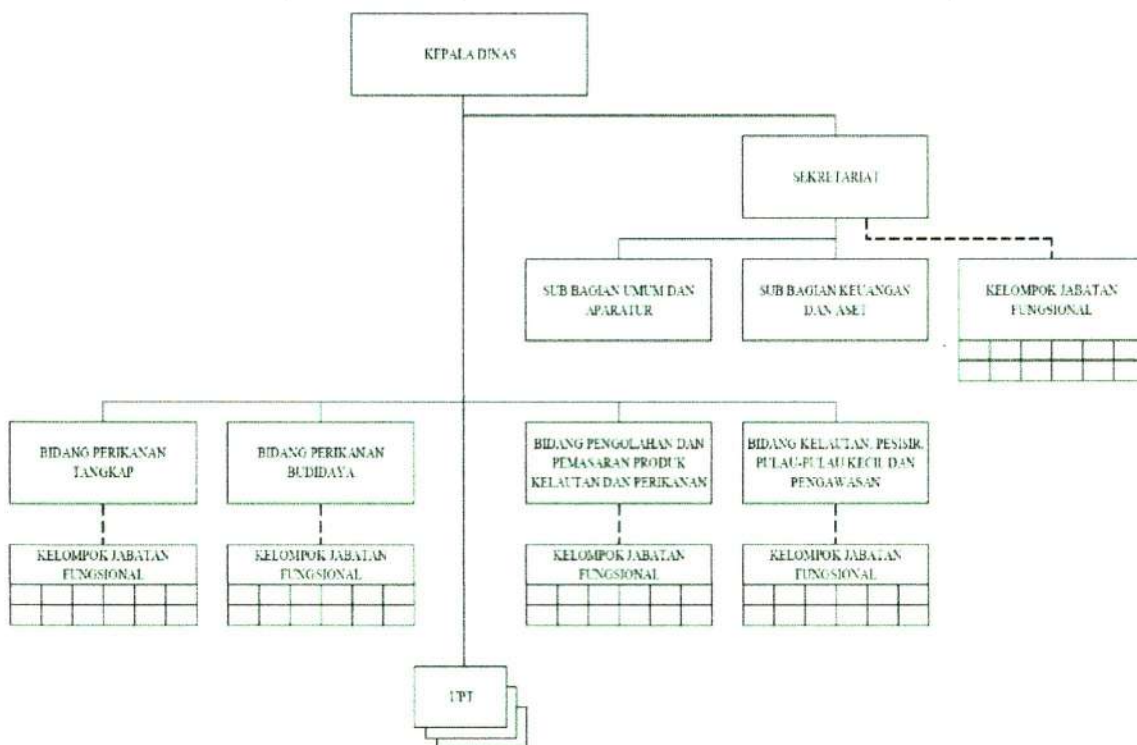
Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

## 2. Susunan Organisasi

Bagan struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini (sesuai Perda no. 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Perda no. 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perda no. 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat).

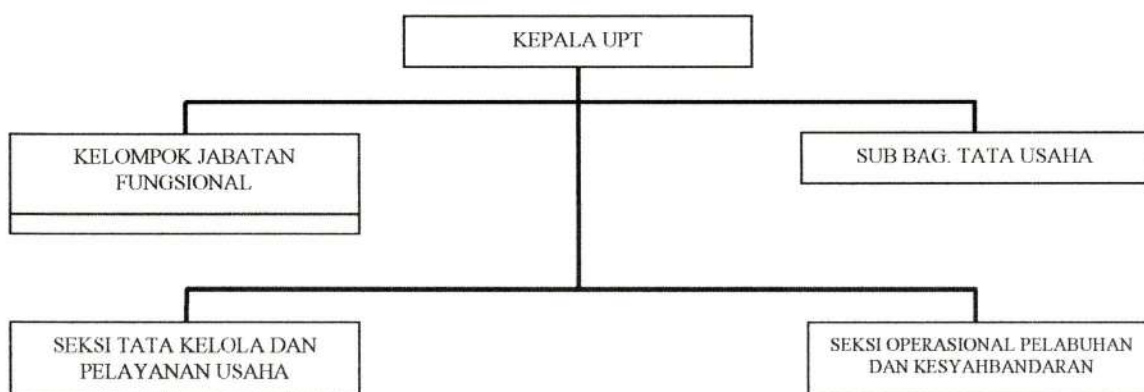
### STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

(Sesuai Pergub Kalbar Nomor 129 Tahun 2021)

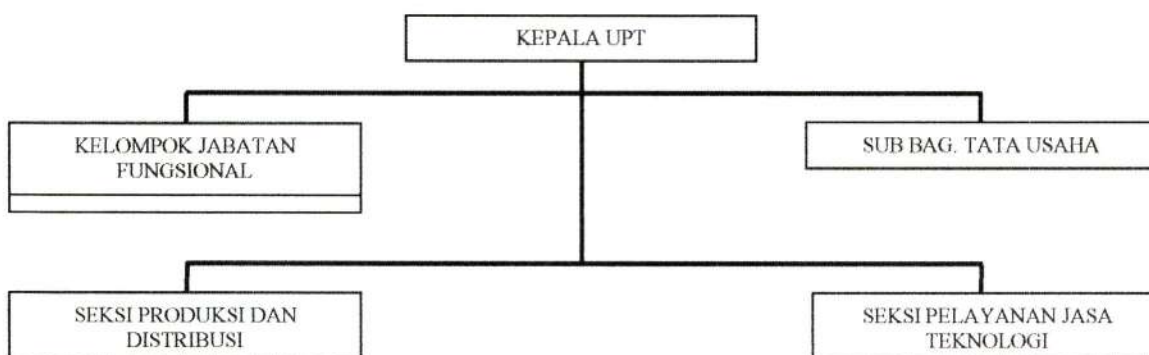




**STRUKTUR ORGANISASI UPT PELABUHAN PERIKANAN**  
(Sesuai Pergub No. 89 Tahun 2017)



**STRUKTUR ORGANISASI UPT PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT (UPT PBAPL)**  
(Sesuai Pergub No. 91 Tahun 2017)



**3. Tupoksi**

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :

**Tugas**

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan sesuai peraturan perundang-undangan.





## **Fungsi**

- a. Perumusan program kerja di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, serta kelautan, pesisir, pulau – pulau kecil dan pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, serta kelautan, pesisir, pulau – pulau kecil dan pengawasan
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, serta kelautan, pesisir, pulau – pulau kecil dan pengawasan;
- d. Pengkoordinasian dan Pembinaan teknis di bidang kelautan dan perikanan
- e. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan administrasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan
- i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang kelautan dan perikanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- c. Bidang Perikanan Tangkap
- d. Bidang Perikanan Budidaya
- e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan
- f. Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-pulau kecil dan Pengawasan
- g. Unit Pelaksana Teknis
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

## **Tugas Pokok dan Fungsi UPT SKPD**

### **a. UPT Pelabuhan Perikanan**

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 89 Tahun 2017 dalam menyelenggarakan tugas Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

**Tugas**

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan di bidang pelabuhan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Fungsi**

- 1) Penyusunan program kerja UPT Pelabuhan Perikanan;
- 2) Perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan aparatur, umum, pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT Pelabuhan Perikanan;
- 3) Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang tata kelola dan pelayanan usaha;
- 4) Pelaksanaan kegiatan teknis operasional pelabuhan dan kesyahbandaran;
- 5) Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan (sandar dan labuh) kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan di pelabuhan perikanan;
- 6) Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
- 7) Pelaksanaan pemeriksaan *log book*, pelayanan bongkar muat produk perikanan;
- 8) Pelaksanaan pengawasan pelayanan penerbitan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan;
- 9) Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- 10) Pelaksanaan pelayanan tugas kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;
- 11) Pelaksanaan pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;
- 12) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan, perkaratinaan ikan, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
- 13) Pelaksanaan tugas lain yang berhubungan dengan bidang pelabuhan perikanan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

**b. UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut**

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 91 Tahun 2017 dalam menyelenggarakan tugas Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

**Tugas**



Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis tertentu di bidang perikanan budidaya air payau dan laut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Fungsi**

- a. Penyusunan program kerja UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut
- b. Perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan aparatur, umum, pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut;
- c. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang produksi dan distribusi;
- d. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan jasa teknologi;
- e. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang penyediaan induk dan benih unggul ikan air payau dan laut yang bersertifikasi;
- f. Pelaksanaan kegiatan teknis penerapan hasil pengembangan aplikasi teknologi budidaya ikan air payau dan laut;
- g. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional pelayanan pengujian laboratorium secara mikrobiologis, organoleptik, kimia dan fisika terhadap kualitas air dan lingkungan budidaya ikan air payau dan laut;
- h. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional penyediaan induk unggul ikan air payau dan laut dalam rangka menunjang kegiatan unit pembenihan ikan air payau dan laut;
- i. Pelaksanaan pelayanan teknis perbenihan dan budidaya air payau dan laut;
- j. Pelaksanaan pelayanan teknis sertifikasi mutu benih ikan air payau dan laut;
- k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut;
- l. Pelaksanaan tugas lain di bidang perikanan budidaya air payau dan laut yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

#### **4. Sumber Daya Aparatur (SDA)**

Jumlah pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat pada Triwulan IV (empat) Tahun 2022 berjumlah 131 orang yang terdiri dari 91 orang berjenis kelamin laki-laki dan 40 orang berjenis kelamin perempuan dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1.1**

Jumlah SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan prov. Kalbar berdasarkan kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, serta Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional TA. 2022

KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL		PANGKAT/ GOLONGAN	JUMLAH PERSONIL		STRUKTURAL/FUNGSIONAL	JUMLAH PERSONIL	
	-	Org		-	Org		-	Org
S3	-	-	Pembina Utama	-	-	Eselon II/a	1	Org
S2	15	Org	Pembina Utama Madya	1	Org	Eselon III/a	4	Org



KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL		PANGKAT/ GOLONGAN	JUMLAH PERSONIL		STRUKTURAL/FUNGSIONAL	JUMLAH PERSONIL	
		Org			Org			Org
S1/DIV	56	Org	Pembina Utama Muda	-	Org	Eselon IV/a	2	Org
DIPLOMA IV	9	Org	Pembina Tingkat I	6	Org	Eselon IV/b	2	Org
SMA/SMK	32	Org	Pembina	9	Org	Fungsional Arsiparis – Ahli Pertama	1	Org
SMP	2	Org	Penata Tingkat I	37	Org	Fungsional Analis Kebijakan – Ahli Muda	1	Org
SD	3	Org	Penata	9	Org	Fungsional Pengelolaan Produksi Perikanan Tangkap – Ahli Muda	3	Org
			Penata Muda Tingkat I	15	Org	Fungsional Analis Akuakultur – Ahli Muda	2	Org
			Penata Muda	18	Org	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan – Ahli Muda	1	Org
						Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan – Ahli muda	1	Org
			Pengatur Tingkat I	27	Org	Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan – Ahli Pertama	1	Org
			Pengatur	4	Org	Fungsional Pengawas Perikanan – Ahli Muda	4	Org
			Pengatur Muda Tingkat I	1	Org	Fungsional Pengawas Perikanan – Ahli Pertama	5	Org
			Pengatur Muda	-	Org	Fungsional Pengawas Perikanan – Pelaksana	2	Org
			Juru	1	Org	Fungsional Pengawas Perikanan – Terampil	1	Org
			Juru Tingkat I	3	Org	Fungsional Umum /Pelaksana	100	Org
<b>JUMLAH</b>	<b>131</b>	<b>Org</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>131</b>	<b>Org</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>131</b>	<b>Org</b>

Sumber: Simpeg Dislautkan Prov. Kalbar Triwulan IV (empat) Tahun 2022

## 5. Sumberdaya Keuangan

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan Tahun Anggaran 2021, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat (termasuk UPTD) mendapatkan dukungan dana bersumber dari APBD sebesar Rp.40,076,536,773 yang terdiri dari Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 33,332,558,094 UPT Pelabuhan Perikanan sebesar Rp. 4,052,526,404 UPT PMHP 1,854,050,727 UPT PBAPL sebesar Rp. 2,691,452,270 dengan total keseluruhan Rp. 40,076,536,773 dengan rincian seperti pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1.2. Alokasi Anggaran APBD DKP Prov. Kalbar

No	UNIT	PAGU / ALOKASI DANA (Rp)		
		APBD MURNI	DAK	TOTAL
1	2	3	4	5
1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	33,332,558,094	-	33,332,558,094
2	UPT PELABUHAN PERIKANAN	4,052,526,404	-	4,052,526,404
3	UPT PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT	2,691,452,270	-	2,691,452,270
	<b>TOTAL</b>			<b>40,076,536,773</b>

### A. Sarana dan Prasarana

Pada dasarnya sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan, telah tersedia





gedung kantor dengan luas yang memadai namun kualitas gedung perlu ditingkatkan, adapun perlengkapan dan kondisinya masih baik (struktur gedung mengalami perubahan/penurunan), berikut sarana dan prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan:

**Tabel 1.3. Data Inventaris Asset**

NO	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH AKHIR DESEMBER 2022		KONDISI
		JUMLAH		
		Barang	Nilai (Rp)	
1	2	3	4	5
1	TANAH (KIB A)	18	669,052,735.00	BAIK
2	PERALATAN DAN MESIN (KIB B)	5948	25,013,077,750.00	BAIK
3	GEDUNG DAN BANGUNAN (KIB C)	57	9,095,959,336.00	BAIK
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN (KIB D)	24	2,035,632,655.00	BAIK
5	ASET TETAP LAINNYA (KIB E)	80	107,148,772.00	BAIK
6	ASET TIDAK BERWUJUD	4	213,777,000.00	BAIK
7	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN (KIB F)	1	352,990,000.00	BAIK
8	ASET LAIN LAIN	2664	1,596,166,565.00	RUSAK
	JUMLAH	8796	39,083,804,813.00	

Sumber data : Data Sementara Daftar Inventaris 2022

### C. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat periode 2018-2022 sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap Yang Inovatif, Produktif, Lestari Dan Berkelanjutan



2. Belum Optimalnya Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya Yang Inovatif, Produktif, Lestari Dan Berkelanjutan
3. Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan dan jaminan keamanan
4. Menurunnya daya dukung dan kerusakan ekosistem pesisir
5. Kondisi penegakan hukum untuk sektor perikanan relatif masih lemah, baik secara kuantitas dan kualitas

Perumusan Isu strategis pada tahun 2022 mengacu pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat periode 2018-2022, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2022 dapat dipetakan meliputi permasalahan pokok masalah dan akar masalah. Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

**Tabel 1.4 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Belum optimalnya Pemantapan kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi perikanan (tangkap dan budidaya), perbaikan sistem distribusi, ketersediaan sarana dan prasarana	1. Belum Optimalnya Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap Yang Inovatif, Produktif, Lestari Dan Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rata-rata pendapatan nelayan Kalbar masih rendah, Volume hasil tangkapan ikan rata-rata masih rendah</li> <li>2. Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap masih Terbatas seperti Ketersediaan BBM tidak merata untuk nelayan pergi melaut, terutama didaerah yang terpencil serta Ketersediaan Es untuk pendinginan ikan hasil tangkapan masih terbatas</li> <li>3. Kualitas SDM nelayan rata – rata masih rendah</li> <li>4. Akses untuk permodalan bagi pengembangan usaha perikanan tangkap terbatas</li> <li>5. Kemampuan sebagian besar armada perikanan tangkap di daerah hanya dapat beroperasi di perairan pantai, karena skalanya yang relatif kecil.</li> <li>6. Sarpras PPI/ Pelabuhan Perikanan belum memadai dan sebagian belum difungsikan secara baik.</li> </ol>



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		2. Belum Optimalnya Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya Yang Inovatif, Produktif, Lestari Dan Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku usaha budidaya Ikan air payau dan laut Kalbar masih sangat rendah dibandingkan dengan potensinya yang tersedia</li> <li>2. Ketersediaan benih ikan unggul untuk Pembudidaya Ikan masih terbatas</li> <li>3. Kualitas SDM Pembudidaya Ikan rata-rata masih rendah</li> <li>4. Pencemaran dan wabah hama penyakit ikan di kawasan perikanan budidaya</li> <li>5. Ketersediaan pakan ikan masih tergantung dari luar kalbar dan Produksi pakan masih mengalami kendala kontinuitas pasokan bahan baku yang bermutu.</li> <li>6. Akses untuk permodalan bagi pengembangan usaha perikanan budidaya terbatas.</li> </ol>
2.	Daya saing dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan masih rendah;	3. Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan dan jaminan keamanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penurunan kualitas/ mutu produk perikanan saat penanganan dan pengolahan.</li> <li>2. Sistem logistik ikan belum tertata dengan baik</li> <li>3. Ekspor hasil perikanan Kalbar rendah</li> <li>4. Inovasi dan daya saing produk olahan hasil perikanan Kalbar masih rendah</li> <li>5. Produk perikanan banyak yang belum terpantau distribusi dan pemasarannya.</li> </ol>
3.	Pengelolaan tata ruang laut dan sumberdaya ikan belum optimal	4. Menurunnya daya dukung dan kerusakan ekosistem pesisir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konflik pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan laut Kalbar antara pelaku usaha, masyarakat dan stake holder terkait</li> <li>2. Belum optimalnya pengelolaan kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif</li> <li>3. Kerusakan ekosistem wilayah pesisir dan laut (rusaknya ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang) Kalbar</li> <li>4. Upaya mitigasi bencana belum</li> </ol>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<p>dilakukan secara terus menerus dan cenderung belum menampakan hasil</p> <p>5. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian ekosistem pesisir laut</p> <p>6. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.</p>
4.	Lemahnya kapasitas kelembagaan pengawas dan penegakan hukum Perikanan	5. Kondisi penegakan hukum untuk sektor perikanan relatif masih lemah, baik secara kuantitas dan kualitas	<p>1. Belum diberdayakannya petugas Pengawas Sumberdaya Ikan dan Pengawas Kapal Ikan secara optimal</p> <p>2. Kurangnya sarana dan SDM penegak hukum di laut</p> <p>3. Illegal, Unreported dan Unregulated Fishing di perairan Laut Kalbar masih marak</p>



## B A B. II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat. Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 . Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023.

Penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

## 1. VISI

Program dan Kegiatan perangkat daerah merupakan manifestasi atas visi, misi, dan program kerja Gubernur, sehingga perencanaan pembangunan daerah lima tahunan perangkat daerah harus disusun selaras dengan visi dan misi gubernur terpilih periode 2018 – 2023 serta mengacu pada agenda dan prioritas pembangunan nasional.

Sebagaimana tertuang pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023, Visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 - 2023 adalah :

**TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT  
MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN  
PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN**

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa 5 (lima) tahun yang akan datang kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur seperti membuka keterisolasian kawasan dengan menambah panjang jalan (membangun jalan baru), membangun jembatan, meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada, mendorong percepatan pembangunan pelabuhan samudera, mendorong peningkatan produksi listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta untuk menopang program hilirisasi (industrialisasi), menambah pasokan air bersih, memperluas ruang terbuka hijau, dan lain-lain. Bersamaan dengan itu, juga akan dilakukan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan akan menjadi landasan utama bagi keseluruhan pelaksanaan program pembangunan yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu rakyat yang mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, hidup dalam lingkungan masyarakat yang agamis, demokratis, berbudaya, bermoral serta dalam suasana yang aman dan damai. Kesejahteraan rakyat seperti ini akan tercermin dalam seluruh aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata, dan nilai-nilai yang melandasi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya.



## 2. MISI

Sedangkan MISI Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat mengemban misi yang **ke 4** dari MISI pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yaitu **Mewujudkan masyarakat sejahtera.**

Sedangkan **MISI** pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan ada enam misi yaitu sebagai berikut:

1. **Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur**, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudra, dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara agar bisa didarati jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.
2. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance***, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang (Tanjungpura).
3. **Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif**, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. **Mewujudkan masyarakat sejahtera**, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.

5. **Mewujudkan masyarakat yang tertib**, yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama, dan wilayah.
6. **Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan**, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.

### 3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 sebanyak 2 tujuan dan 3 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

Tujuan jangka menengah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan
2. Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan

Adapun sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Produksi Perikanan
2. Meningkatnya Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan
3. Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja sasaran pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat yang akan dicapai di tahun 2022 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.1

**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja  
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan		Laju Pertumbuhan PDRB Subsektor Perikanan (Persen)	3,37	1,27 - 3,09	3,73 - 4,29	3,92 - 4,52	4,09 - 4,64
		Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	249,614	221,730	227,625	233,681	239,903
		Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	-	-	(BB)	(BB)	(BB)
			Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	-	-	(BB)	(BB)	(BB)
2	Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan		NTP Perikanan (%)	104	101	102	103	104
		Meningkatnya Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan	Indeks Harga yang diterima Subsektor Perikanan	-	-	105	106	107

Sumber : Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat periode 2019-2023

### Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat**

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
					ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan	1.1	Laju Pertumbuhan PDRB Subsektor Perikanan (PDRB)	Persen		$G = \frac{\text{PDRB 1} - \text{PDRB 0}}{\text{PDRB 0} \times 100\%}$	BPS
1.1	Meningkatnya produksi perikanan	1.1.1	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	Ton		$\Sigma = \text{Total Produksi Perikanan tangkap} + \text{Total Produksi Perikanan budidaya}$	Data Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan
1.2	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	1.2.1	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai		Nilai RB	Inspektorat Provinsi
		1.2.2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai		Total nilai dari 5 aspek SAKIP yang dievaluasi yaitu : - Perencanaan kinerja nilai maks 30 - Pengukuran kinerja nilai maks 25 - Pelaporan kinerja nilai maks 15 - Evaluasi kinerja nilai maks 10 - Capaian kinerja nilai maks 20	Inspektorat Provinsi
2	Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	2.1	Meningkatnya Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan (NTP)	Persen		Dilakukan dengan cara wawancara langsung	BPS.
2.1	Meningkatnya Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan		Indeks Harga yang diterima Subsektor Perikanan	Poin		$\Sigma = \text{Nilai indeks harga yang diterima nelayan (It) dan indeks harga yang diterima pembudidaya ikan (It)}$	BPS

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022



## Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2022 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Berikut Rencana Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 :

**Tabel 2.3**  
**Rencana Kinerja Tahun 2022**  
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4		
1.	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan		Laju Pertumbuhan PDRB Subsektor Perikanan	(Persen)	3,92 - 4,52
		Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	Ton	233,681
		Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai	(BB)
			Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	(BB)
2	Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan		NTP Perikanan	103	103
		Meningkatnya Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan	Indeks Harga yang diterima Subsektor Perikanan	Point	106



## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Tlanakan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Pada tanggal 03 bulan Januari tahun 2022 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021
1	2	4	
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan (Ton)	233.681
2.	Meningkatnya Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan	Indeks Harga yang diterima Subsektor Perikanan (%)	106
3.	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai RB Dinas Kelautan dan Perikanan	80,00 (BB)
		Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	79,00 (BB)





### B A B. III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Pengkategorian Capaian Kinerja**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	$120 \geq X > 100$
2	Baik	$X = 100$
3	Cukup	$80 < X < 100$
4	Kurang	$50 \leq X \leq 80$
5	Sangat Kurang	$X < 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan.

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan



sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.2. Capaian Indikator kinerja Utama Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan (Ton)	233,680.89	260,536.64	111.49
2	Meningkatnya Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan	Indeks Harga yang diterima Subsektor Perikanan (%)	106	114.19	107.73
3	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai RB Dinas Kelautan dan Perikanan	80,00 (BB)	86,95 (A)	108.69
		Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	79 (BB)	80 (A)	102.03
<b>Capaian</b>					<b>107.48</b>

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat pada kinerja sasaran strategis berjumlah 107.48 % hal ini dapat dikategorikan baik yang mana pada sasaran Meningkatkan Produksi Perikanan dengan realisasi indikator kinerja Produksi Perikanan sebesar 260,536.64 ton atau 111.49 %, pada sasaran Meningkatkan Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan dengan realisasi kinerja Indeks Harga yang diterima Subsektor Perikanan (%) dengan poin 114.19 atau 107.73 % dan pada sasaran Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi kinerja Nilai RB Dinas Kelautan dan Perikanan dengan nilai A atau sebesar 102,03 dan Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan dengan nilai A atau sebesar 108.69 %.

### a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun capaian efisiensi penggunaan sumberdaya secara total Apabila dibandingkan dengan persentase Realisasi Anggaran total sebesar **97,92 %** dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 107.48 %, maka tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian kinerja pada sasaran ini adalah sebesar 9.56 %. Untuk masing masing sasaran dapat dilihat capaian efisiensi penggunaan sumberdaya Sebagaimana tabel 3.2 analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dibawah ini :

**Tabel 3.3.** Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	6,788,585,200	6,726,405,313	99.08	111.49	12.57
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2,122,043,850	2,095,722,280	98.76		
2	Meningkatnya Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	2,225,316,848	2,183,736,400	98.13	107.73	8.98
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	861,223,600	861,118,700	99.99		
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1,661,144,200	1,629,818,991	98.11		
3	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	19,674,244,396	19,143,039,878	97.30	105.36	8.06
<b>Capaian Total</b>			<b>33,332,558,094</b>	<b>32,639,841,562</b>	<b>97.92</b>	<b>107.48</b>	<b>9.56</b>





**b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.**

Untuk program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja pada masing-masing sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada sasaran Meningkatnya produksi perikanan terdapat dua program yang menunjang yaitu Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya. Untuk Program penggelolan perikanan tangkap terdapat 6 kegiatan dan 10 sub kegiatan sedangkan pada Program Budidaya terdapat 3 Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan pokok
2. Pada sasaran Meningkatnya Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan terdapat 3 program yang menunjang yang pertama Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil yang terdiri dari 2 Kegiatan dan 7 sub kegiatan yang kedua Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan yang terdiri dari 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan yang ketiga Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan yang terdiri dari 3 kegiatan dan 7 sub kegiatan
3. Untuk sasaran Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari satu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang terdiri dari kegiatan rutin di sekretariat.

**Tabel 3.4. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan tahun 2022**

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Tingkat Realisasi	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>					
Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan (%)				
Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah produksi perikanan (Ton)	233,681	260,536.64	111	Menunjang
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)</b>	<b>154,891.40</b>	<b>172,149.30</b>	<b>111.14</b>	Menunjang

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Tingkat Realisasi	Menunjang/ Tidak Menunjang
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan yang menerima Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap (Kelompok)	12	26	217	Menunjang
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sumberdaya Ikan (Dokumen)	3	3	100	Menunjang
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Perikanan Tangkap yang diserahkan ke masyarakat (Paket)	18	18	100	Menunjang
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang diserahkan kemasyarakat (Unit/Paket Pekerjaan)	14	14	100	Menunjang
Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Kapal Perikanan Tangkap 10 sd 30 GT yang Berizin dan Tercatat sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku (Unit)	175	421	241	Menunjang
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Pertimbangan Teknis Perizinan Usaha Perikanan Tangkap (Rekomendasi)	175	421	241	Menunjang
Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kapal Perikanan Tangkap < 10 GT yang terdaftar/ tercatat sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku (Unit)	202	677	335	Menunjang
Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Kapal perikanan yang diterbitkan (Dokumen)	202	677	335	Menunjang
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Pelabuhan yang dikelola Provinsi (Unit)	7	7	100	Menunjang
Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Provinsi (Dokumen)	2	2	100	Menunjang
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Provinsi (Unit)	1	1	100	Menunjang
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pendistribusian BBM (Dokumen)	1	1	100	Menunjang
Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Kapal Perikanan Tangkap yang disetujui Pengadaannya (Unit)	62	126	203	Menunjang
Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan Tangkap 10 sd 30 GT (Rekomendasi)	62	126	203	Menunjang
Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Kapal Perikanan 10 sd 30 GT yang terdaftar (Unit)	52	50	96	Menunjang
Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai	Jumlah Buku Kapal Perikanan Ukuran 10 sd 30 GT (Buku)	52	50	96	Menunjang





Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Tingkat Realisasi	Menunjang/ Tidak Menunjang
dengan 30 GT					
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP (UPTD-PP)</b>	<b>Produksi Perikanan yang didaratkan di pelabuhan (Ton)</b>	<b>4,900</b>	<b>7,520.77</b>	<b>153.49</b>	Menunjang
<b>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</b>	Tersedianya sarana dan prasarana pelabuhan yang memadai , Meningkatnya Jumlah PAD yang didapat dan Meningkatnya Aktivitas Bongkar Muat Ikan di Pelabuhan (Tahun)	1	1	100	Menunjang
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah sarana dan prasarana pelabuhan yang di sediakan (Unit)	2	2	100	Menunjang
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Frekuensi Bongkar Muat Kapal Perikanan (Kali)	1,235	2,508	203	Menunjang
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)</b>	<b>78,789.49</b>	<b>88,387.34</b>	<b>112.18</b>	Menunjang
<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Usaha Perikanan Budidaya yang sudah mempunyai izin (Unit)</b>	<b>28</b>	<b>23</b>	<b>82.142857 1</b>	Menunjang
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi CBIB dan CPIB yang diterbitkan (Rekomendasi)	28	23	82	Menunjang
<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing</b>	<b>Jumlah Unit Usaha Yang Direkomendasikan Untuk Penerbitan Izin Usaha Perikanan (Unit)</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>33</b>	Menunjang
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi teknis izin usaha perikanan (Rekomendasi)	3	1	33	Menunjang
<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>	<b>Persentase Peningkatan Usaha Pembudidaya Ikan di Laut (%)</b>	<b>3</b>	<b>6.29</b>	<b>209.67</b>	Menunjang
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	100	Menunjang
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang diserahkan ke masyarakat (Unit)	5	5	100	Menunjang
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Percontohan budidaya Ikan Laut (Paket);	1	1	100	Menunjang
	Jumlah Sarana Percontohan budidaya rumput laut (Paket)	5	5	100	Menunjang

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Tingkat Realisasi	Menunjang/ Tidak Menunjang
Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bantuan sarana pembudidaya ikan (pembenihan dan pembesaran) (Paket)	5	6	120	Menunjang
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sampel yang diambil dalam rangka pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan (Sampel)	17	18	106	Menunjang
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah lokasi Pembudidaya di Kawasan konservasi yang dibina dan dipantau (Pembudidaya)	7	8	114	Menunjang
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA (UPTD-BPAPL)</b>	<b>Produksi Benih/ Benur Unggul Komoditas Ikan Air Payau dan Laut (ekor)</b>	<b>4,764,375</b>	<b>6,500,000</b>	<b>136</b>	Menunjang
<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>	<b>Jumlah Penyediaan Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar UPT- PBAPL (Paket)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100</b>	Menunjang
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar UPT-PBAPL (Paket)	1	1	100	Menunjang
Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar UPT-PBAPL (Paket)	1	1	100	Menunjang
<b>Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan</b>					
<b>Meningkatnya Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan</b>	<b>Indeks Harga yang diterima sub sektor perikanan</b>	<b>106</b>	<b>114.19</b>	<b>108</b>	Menunjang
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>	<b>Persentase Kawasan Ruang Laut Dan Konservasi Yang Dikelola (%) ;</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>150</b>	Menunjang
<b>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>	<b>Meningkatnya Jumlah Kawasan Ruang Laut dan Konservasi Yang Dikelola (Kawasan)</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>125</b>	Menunjang



Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Tingkat Realisasi	Menunjang/ Tidak Menunjang
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola (Kawasan)	4	5	125	Menunjang
Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang di rehabilitasi (Kawasan)	1	1	100	Menunjang
Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dimitigasi (Kawasan)	1	1	100	Menunjang
<b>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil</b>	<b>Jumlah Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Diberdayakan dan Dibina (kelompok)</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>100</b>	Menunjang
Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dikembangkan kapasitasnya (Orang);	50	50	100	Menunjang
	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diserahkan (Unit)	10	10	100	Menunjang
Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Peserta Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)	50	50	100	Menunjang
Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Peserta Pertemuan Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)	50	50	100	Menunjang
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Peserta Bimtek Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil (Orang)	50	50	100	Menunjang
<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan terhadap ketentuan peraturan dan per Undang-Undang yang berlaku (%)</b>	<b>60</b>	<b>55.07</b>	<b>91.78</b>	Menunjang
<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>	<b>Persentase Cakupan Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil yang dipantau dari illegal fishing (%)</b>	<b>45</b>	<b>54.26</b>	<b>120.58</b>	Menunjang
Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pemanfaatan ruang laut yang diperiksa (Unit)	5	50	1,000	Menunjang
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha perikanan tangkap yang diperiksa (Unit)	150	150	100	Menunjang

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Tingkat Realisasi	Menunjang/ Tidak Menunjang
Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha perikanan Budidaya yang diperiksa (Unit)	10	10	100	Menunjang
Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Pengawas yang dibina (Kelompok)	30	30	100	Menunjang
<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Frekuensi Gelar Operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Di Wilayah Perairan Umum Lintas Kab/Kota (Kali)</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	Menunjang
Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha pemasaran dan pengolahan hasil yang diperiksa (Unit)	20	23	115	Menunjang
<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>Produksi olahan hasil perikanan (ton)</b>	<b>16,685</b>	<b>26,773.57</b>	<b>160.46</b>	Menunjang
<b>Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah UPI yang Berizin dan Tercatat sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku (Unit)</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>114</b>	Menunjang
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Pertimbangan Teknis Perizinan Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan(Rekomendasi)	5	5	100	Menunjang
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Produk Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Dokumen)	1	1	100	Menunjang
<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>	<b>Jumlah Kelompok Pengolah Dan Pemasar Yang Dibina (Kelompok)</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>100</b>	Menunjang
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah UPI (Unit Pengolahan Ikan) dan Sentra pengolahan yang dibina (Unit)	16	16	100	Menunjang
Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang direhabilitasi sarana dan prasarananya (Unit)	4	3	75	Menunjang
<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>umlah Kelompok Pengolahan Dan Pemasaran (POKLAHSAR) Yang Berkembang (kelompok)</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>100</b>	Menunjang



Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Tingkat Realisasi	Menunjang/ Tidak Menunjang
Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah bahan baku produk perikanan (Ton)	2.50	4.86	194.40	Menunjang
Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Sarana Pemasaran dan Peralatan Pengolahan yang di berikan ke Kelompok pengolah dan pemasar produk KP (Unit)	65	125	192	Menunjang
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data Base Lokasi Pengolah dan Pemasar Produk Perikanan di Kalbar (UPI) (Unit)	40	40	100	Menunjang
<b>Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan (Nilai)	<b>BB</b>	<b>A</b>	<b>108.69</b>	Menunjang
	Nilai RB Dinas Kelautan dan Perikanan (Nilai)	<b>BB</b>	<b>A</b>	<b>102.03</b>	Menunjang
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan prosedur/tepat waktu (%) ; Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP (%); Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tugas sesuai standar (%); Persentase tingkat Disiplin Aparatur (%); nilai Kepuasan Layanan Internal (Nilai)</b>	<b>100; 100; 100; 100</b>	<b>100; 100; 100; 100</b>	<b>100</b>	Menunjang
<b>Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan tepat waktu (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Menunjang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan kinerja (Dokumen)	1	1	100	Menunjang
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD (Dokumen)	1	1	100	Menunjang
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	1	1	100	Menunjang
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	100	Menunjang
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja (Dokumen)	1	1	100	Menunjang
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Frekuensi Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Bantuan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan di Kab/Kota (Dokumen; Kali)	4	4	100	Menunjang
	Frekuensi Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Bantuan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan di Kab/Kota (Dokumen; Kali)	14	15	107	Menunjang
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan keuangan (Dokumen)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100</b>	Menunjang

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Tingkat Realisasi	Menunjang/ Tidak Menunjang
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran Gaji dan Tunjangan (Bulan)	12	12	100	Menunjang
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen keuangan yang diverifikasi/ jumlah pengajuan SPM (Dokumen)	220	205	93	Menunjang
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan bahan tanggapan (Dokumen)	1	1	100	Menunjang
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu (Dokumen)	1	1	100	Menunjang
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Penyusunan laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	100	Menunjang
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Menunjang
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang diamankan (Unit)	4	4	100	Menunjang
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian BMD (Dokumen)	1	1	100	Menunjang
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang (Inventarisasi Aset) (Dokumen)	1	1	100	Menunjang
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase peningkatan disiplin pegawai Dinas/Persentase ASN yang menyusun dan melaporkan Kinerja tepat waktu /Persentase pengembangan Kompetensi Pegawai sesuai dengan perencanaan (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Menunjang
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana Peningkatan Prasarana Disiplin Pegawai (unit)	1	1	100	Menunjang
Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas (Stel)	100	169	169	Menunjang
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen kinerja individu (Dokumen)	1	1	100	Menunjang
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat minimal 20 JP (Orang)	10	10	100	Menunjang
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat mengikuti sosialisasi (Orang)	5	70	1,400	Menunjang
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimtek (Orang)	10	18	180	Menunjang
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan barang /persentase sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dikelola dengan baik/persentase tertib pengelolaan arsip (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Menunjang
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (Jenis)	6	6	100	Menunjang



Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Tingkat Realisasi	Menunjang/ Tidak Menunjang
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jenis)	7	7	100	Menunjang
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (Jenis)	6	6	100	Menunjang
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang cetakan (Item);	12	12	100	Menunjang
	jumlah penyediaan bahan penggandaan (Lembar)	42	42	99	Menunjang
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Jenis)	1	1	100	Menunjang
Fasilitasi Kunjungan Tamu	kunjungan tamu yang difasilitasi (Tahun)	1	1	100	Menunjang
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kali)	21	37	176	Menunjang
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip yang diolah (Berkas)	400	400	100	Menunjang
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pengelolaan Data dan informasi Kelautan dan Perikanan berbasis elektronik (Dokumen)	1	1	100	Menunjang
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tugas (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Menunjang
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan dan mesin lainnya (Unit)	20	37	185	Menunjang
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Menunjang
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi pembayaran listrik kantor dan internet (Bulan)	12	12	100	Menunjang
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor (%)	100	100	100	Menunjang
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase BMD dalam kondisi baik (%)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	Menunjang
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dipelihara (Unit)	5	5	100	Menunjang
Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang di pelihara (Unit)	2	2	100	Menunjang
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Frekuensi peralatan mesin yang dipelihara (Jenis)	5	5	100	Menunjang
<b>UPT PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT</b>					Menunjang
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Perencanaan, Keuangan, Administrasi Umum dan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Menunjang

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Tingkat Realisasi	Menunjang/ Tidak Menunjang
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan tepat waktu (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Menunjang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan kinerja (Dokumen)	1	1	100	Menunjang
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD (Dokumen)	1	1	100	Menunjang
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	100	Menunjang
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LAKIP (Dokumen)	1	1	100	Menunjang
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Perencanaan, Keuangan, Administrasi Umum Dan Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Menunjang
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen keuangan yang diverifikasi/ jumlah pengajuan SPM (Dokumen)	1	1	100	Menunjang
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu (Dokumen)	1	1	100	Menunjang
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	100	Menunjang
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Perencanaan, Keuangan, Administrasi Umum Dan Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Menunjang
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang (Dokumen)	1	1	100	Menunjang
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Perencanaan, Keuangan, Administrasi Umum Dan Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Menunjang
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Penilaian angka Kredit Pegawai dan Penyusunan Anjab (Dokumen)	1	1	100	Menunjang
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen laporan kinerja individu (Dokumen)	1	1	100	Menunjang
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Perencanaan, Keuangan, Administrasi Umum Dan Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Menunjang



Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Tingkat Realisasi	Menunjang/ Tidak Menunjang
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (Jenis)	8	8	100	Menunjang
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jenis)	39	39	100	Menunjang
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor (Jemis)	1	1	100	Menunjang
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan bahan penggandaan (Jenis)	8	8	100	Menunjang
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD (Tahun)	1	1	100	Menunjang
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Perencanaan, Keuangan, Administrasi Umum Dan Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Menunjang
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)	12	16	133	Menunjang
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya (Unit/Paket)	7	7	100	Menunjang
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Paket)	1	1	100	Menunjang
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Perencanaan, Keuangan, Administrasi Umum Dan Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Menunjang
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pelayanan (Bulan)	12	12	100	Menunjang
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor (%)	100	100	100	Menunjang
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Perencanaan, Keuangan, Administrasi Umum Dan Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Menunjang
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dipelihara (Unit)	3	3	100	Menunjang
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara (Jenis)	5	5	100	Menunjang
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi (Paket)	3	3	100	Menunjang

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Tingkat Realisasi	Menunjang/ Tidak Menunjang
<b>UPT PELABUHAN PERIKANAN</b>				#DIV/0!	Menunjang
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)</b>	100	100	100	Menunjang
<b>Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan tepat waktu (Dokumen)</b>	3	3	100	Menunjang
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA SKPD (Dokumen)	1	1	100	Menunjang
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen DPA SKPD (Dokumen)	1	1	100	Menunjang
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Laporan Kinerja (Dokumen)	1	1	100	Menunjang
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Keuangan (Dokumen)</b>	12	12	100	Menunjang
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah honorarium Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Tahun (Bulan)	12	12	100	Menunjang
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran (Dokumen)	13	12	92	Menunjang
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan BMD yang sesuai ketentuan (Bulan)</b>	12	12	100	Menunjang
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Asuransi Barang Milik Dearah ( Polis Asuransi )	3	3	100	Menunjang
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang (Dokumen)	12	12	100	Menunjang
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Jumlah dan Kualitas pegawai Perangkat Perangkat Daerah (Bulan)</b>	12	12	100	Menunjang
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas (Stel)	31	31	100	Menunjang
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bulan)	10	10	100	Menunjang
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Barang (Bulan)</b>	12	12	100	Menunjang
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen alat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (jenis)	10	10	100	Menunjang
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jenis)	27	27	100	Menunjang
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor (Bulan)	12	12	100	Menunjang
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan (Bulan)	12	12	100	Menunjang



Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Tingkat Realisasi	Menunjang/ Tidak Menunjang
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan (Jenis)	2	2	100	Menunjang
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kali)	22	20	91	Menunjang
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tugas (Tahun)</b>	1	1	100	Menunjang
Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan Mebel	6	6	100	Menunjang
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya (Unit)	61	67	110	Menunjang
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Tahun)</b>	1	1	100	Menunjang
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Layanan Pengiriman Surat (Bulan)	12	12	100	Menunjang
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi Pembayaran Listrik Kantor, dan Internet (Bulan)	12	12	100	Menunjang
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor (Layanan)	2	2	100	Menunjang
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor (Tahun)</b>	1	1	100	Menunjang
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara (unit)	5	4	80	Menunjang
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara (Jenis)	5	5	100	Menunjang
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara (Unit)	4	4	100	Menunjang
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi (Paket)	2	2	100	Menunjang

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.6. Realisasi Kinerja Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2021			2022			Peningkatan
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan (Ton)	227,625	228,186.55	100.25	233,680.89	260,536.64	111.49	1.14
2	Meningkatnya Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan	Indeks Harga yang diterima Subsektor Perikanan (%)	105	110.95	105.67	106	114.19	107.73	1.03
3	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai RB Dinas Kelautan dan Perikanan	BB	BB	100.00	80,00 (BB)	86,95 (A)	108.69	1.09
		Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	BB	BB	100.00	79 (BB)	80 (A)	102.03	1.02

Jika dibandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu ini terjadi peningkatan disemua indikator kinerja utama Produksi perikanan meningkat sebesar 1.14 %. Indeks Harga yang diterima Subsektor Perikanan juga meningkat sebesar 1.03 % serta nilai SAKIP dan RB dari BB menjadi A.

**a. Jumlah Produksi Perikanan**

Adapun jumlah produksi perikanan dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7. Realisasi produksi perikanan dari tahun 2018 – 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	REALISASI					TARGET
			2018	2019	2020	2021	2022*	2023
1	2	3	5	6	7		8	
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan (Ton)	248,698.73	243,802.72	232,817.71	228,186.56	260,536.64	239,903
		Pertumbuhan		-2.01	-4.72	-2.03	12.42	
<b>Rata-rata pertumbuhan</b>						<b>1.76</b>		

\*Data Sementara





Rata Pertumbuhan untuk produksi perikanan ini sebesar 1.76%. Pada Tahun 2022 pertumbuhan produksi perikanan mengalami peningkatan sebesar 12,42 persen yang mana ditahun sebelumnya mengalami penurunan. Pertumbuhan produksi perikanan di tahun 2021 secara target memang sudah tercapai namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan sebesar -2.03 % jika dibanding dengan tahun 2020, pada tahun 2020 juga terjadi penurunan -4.72 % dan 2019 sebesar -2.01 %. Penyebab yang paling signifikan turunnya produksi perikanan tangkap tahun 2021 adalah kondisi pandemi. Sejak mewabahnya pandemi 6 (enam) bulan pertama pemasaran ikan laut mengalami kendala penetrasi pasar berkurang 50% baik lokal maupun antar provinsi bahkan ekspor perbatasan entikong tidak ada aktifitas akibat kebijakan lockdown dari pihak Malaysia.

**b. Indeks Harga yang diterima Pelaku Usaha Perikanan**

Meningkatnya produksi perikanan yang juga diikuti oleh meningkatnya nilai produksi perikanan akan berdampak pada meningkatnya pendapatan pembudidaya ikan dan nelayan. Peningkatan pendapatan ini juga berarti meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sektor perikanan.

**Tabel 3.8.**

Realisasi Index Harga yang diterima sektor Perikanan 2021 – 2022



Bulan	2021			2022		
	Perikanan Tangkap	Perikanan Budidaya	Perikanan	Perikanan Tangkap	Perikanan Budidaya	Perikanan
Januari	110.73	103.67	109.42	112.68	103.94	111.07
Februari	111.23	104.60	110.01	112.69	103.93	111.08
Maret	111.24	104.32	109.96	114.18	104.06	112.31
April	111.2	104.31	109.93	114.98	103.49	112.86
Mei	111.41	104.59	110.15	115.67	103.63	113.45
Juni	111.81	104.4	110.45	116.08	104.35	113.91
Juli	113.11	104.34	111.49	116.45	104.43	114.23
Agustus	113.62	105.2	112.07	116.55	104.45	114.32
September	112.97	105.72	111.63	118.7	106.05	116.37
Oktober	113.61	105.85	112.18	118.78	106.65	116.55
November	113.36	105.67	111.94	118.72	107.09	116.57
Desember	113.87	104.72	112.19	119.78	107.98	117.6
<b>Rata -Rata</b>	<b>112.35</b>	<b>104.78</b>	<b>110.95</b>	<b>116.27</b>	<b>105.00</b>	<b>114.19</b>

\* Sumber : BPS Prov. Kalbar

Indeks Harga yang diterima dapat dilihat fluktuasi harga barang yang dihasilkan nelayan dan pembudidaya indeks ini digunakan juga sebagai penunjang dalam perhitungan pendapatan sektor perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Semakin tinggi nilai Indeks yang diterima, maka semakin tinggi nilai produksi yang dihasilkan pelaku usaha perikanan, sedangkan bila semakin turun maka pendapatan yang diterima pelaku usaha perikanan makin rendah. Pada dua tahun terakhir untuk poin indeks harga di semua sektor baik perikanan budidaya dan perikanan tangkap setiap bulannya di atas 100 hal ini mengindikasikan bahwa nilai produksi perikanan yang dihasilkan semakin baik. Dapat dibandingkan bahwa ada peningkatan Indeks Harga yang diterima dari tahun 2021 dari 110.95 % menjadi 114.19 % pada tahun 2020 Indeks Harga yang diterima tertinggi pada bulan Desember sebesar 112.19 % sedangkan terendah di bulan April sebesar 109.93 % sedangkan pada tahun 2021 Tertinggi di bulan Desember sebesar 112.19 dan terendah di bulan Januari sebesar 109.42. dengan kesimpulan bahwa Indeks Harga yang diterima tertinggi pada 2 tahun tersebut pada bulan Desember.

### 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat periode 2018-2023 diuraikan sebagai berikut :





Tabel 3.9. Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	REALISASI			TARGET	Tingkat Kemajuan
			2020	2021	2022*	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan (Ton)	234216.25	228,186.55	260,536.64	233,680.89	111.49
2	Meningkatnya Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan	Indeks Harga yang diterima Subsektor Perikanan (%)	102.28	110.95	114.19	106	107.73
3	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai RB Dinas Kelautan dan Perikanan	BB	BB	A	BB	
		Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	BB	BB	A	BB	

\*Data Sementara

Jika dibandingkan capaian realisasi tahun 2022 dengan target jangka menengah sesuai dengan Perubahan Renstra Tahun 2019-2023 semua indikator utama sudah mencapai target jangka menengah yang mana Capaian produksi perikanan tahun 2022 dibandingkan dengan target di tahun 2023 sudah mencapai 111,49 %. Sedangkan Indeks Harga yang diterima sub sector perikanan sudah mencapai 107.73 % dan nilai sakip dan RB juga mengalami peningkatan menjadi AA dibanding target BB.

#### 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.10. Realisasi tahun 2021 dan Target Nasional

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi Tahun 2022	Target Nasional	% Capaian
1	2	3	6	7	8
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan (Ton)	260,536.64	27,090,000.00	0.96



Adapun Target Nasional untuk produksi perikanan sesuai dengan Rentra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 sebesar 27.090.000 Ton. Jika dibanding terhadap target nasional maka produksi perikanan Kalimantan Barat berkontribusi sebesar 0,96 % dengan realisasi 260.536,64 Ton.

**5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;**

**A. Hambatan dan Kendala dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan antara lain :**

Ada 2 Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan atau peningkatan/penurunan pencapaian kinerja pada sasaran 1 yaitu Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya. Adapun penyebab keberhasilan/kegagalan capaian kinerja pada indikator masing-masing program dapat disampaikan sebagai berikut ini :

**a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap :**

Hambatan dan Kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

1. Masih dominannya skala usaha nelayan kecil belum efisien dan memiliki produktivitas usaha yang rendah.
2. Masih rendahnya akses permodalan dari perbankan/lembaga keuangan untuk mendukung usaha nelayan.
3. Kurangnya kesadaran nelayan terhadap kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya misalnya masih banyaknya penggunaan alat penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan.
4. Kurangnya kesadaran nelayan untuk aktif mengikutsertakan dalam program perlindungan sosial (asuransi) nelayan.
5. Masih minimnya bantuan paket sarana perikanan tangkap (armada, alat penangkap ikan, alat bantu penangkap ikan, mesin kapal perikanan).
6. Masih sulitnya nelayan kecil untuk mendapatkan BBM Solar bersubsidi dengan lancar dan cukup di lokasi sentra-sentra nelayan.
7. Masih belum optimalnya fungsi-fungsi pelabuhan perikanan.
8. Masih lemahnya kelembagaan nelayan melalui (Kelompok Usaha Bersama dan Koperasi).
9. Masih lemahnya manajemen usaha nelayan dengan usaha yang efektif dan efisien.

**Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :**

1. Modernisasi kapal perikanan dengan armada yang dilengkapi dengan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, mesin kapal perikanan dan tempat penyimpanan ikan yang layak dan memadai.
2. Mendorong dan kerjasama yang baik dengan pihak perbankan/lembaga keuangan agar dapat memfasilitasi permodalan nelayan kecil.
3. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi agar nelayan menggunakan alat penangkap ikan yang ramah lingkungan.
4. Mendorong dan fasilitasi nelayan untuk mengikuti program perlindungan sosial (asuransi nelayan).





5. Mengoptimalkan bantuan paket sarana perikanan tangkap (armada penangkapan, alat penangkap ikan, alat bantu penangkap ikan, mesin kapal perikanan) dalam rangka pengembangan usaha perikanan tangkap
6. Mendorong dan fasilitasi nelayan kecil untuk mendapatkan BBM Solar bersubsidi dengan lancar dan cukup di lokasi sentra-sentra nelayan.
7. Mengoptimalkan fungsi-fungsi pelabuhan perikanan khususnya pelabuhan perikanan yang sudah diserahkan P3D nya.
8. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan menumbuhkembangkan kelembagaan nelayan (KUB dan Koperasi).
9. Meningkatkan manajemen usaha nelayan melalui kemitraan, Bimtek , pendampingan dan studi banding.

**b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya :**

Hambatan dan Kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

1. Penyediaan Induk unggul masih sangat terbatas
2. Kualitas dan Kuantitas SDM Budidaya Perikanan masih kurang
3. Sarana dan Prasarana pembenihan yang ada masih belum memadai
4. Masih Banyak pelaku usaha yang belum menerapkan CBIB disebabkan secara teknis pembudidaya udang instensif masih belum memenuhi persyaratan dikarenakan tidak memiliki IPAL sebagai salah satu syarat penerbitan sertifikat CBIB.
5. Tingkat mortalitas cukup tinggi karena perubahan alam dan lingkungan

**Upaya pemecahan dalam mengantisififikasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran Meningkatkan Produksi Perikanan antara lain :**

1. Menyediakan Induk dan benih unggul yang memenuhi standar
2. Bimbingan teknis dan pelatihan bagi petugas dan Aparatur teknis Budidaya Perikanan
3. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Kalbar (*penyediaan benih ikan unggul, pakan murah, pupuk dan obat-obatan ikan, pengembangan Balai Benih Ikan, dll*)
4. Penguatan akses Permodalan bagi pembudidaya ikan dalam memenuhi sarana dan prasarana budidaya yang dipersyaratkan untuk penerapan CBIB
5. Penerapan teknologi budidaya terbaru seperti budidaya ikan system Bioplok, bak terpal dan perkolaman sehingga kualitas air dapat dikontrol secara rutin dan Pengendalian hama penyakit ikan.

**B. Hambatan dan Kendala dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan antara lain :**

Ada 3 Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja pada sasaran 2 yaitu Program Pengolahan, Pemasaran dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan, Program Pengelolaan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Adapun penyebab

keberhasilan/kegagalan capaian kinerja pada indikator masing-masing program dapat disampaikan sebagai berikut ini :

**a. Program Pengolahan, Pemasaran dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan**

**Hambatan dan Kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :**

1. Masih terbatasnya sarana pengolahan di unit pengolah ikan (UPI) yang menggunakan teknologi terbaru dan memenuhi standard mutu.
2. Penurunan kualitas/ mutu produk perikanan saat penanganan dan pengolahan.
3. Sistem logistik ikan belum tertata dengan baik
4. Inovasi dan daya saing produk olahan hasil perikanan Kalbar perlu ditingkatkan
5. Pasar Produk olahan dan distribusi perlu diperluas.

**Upaya pemecahan dalam mengantisififikasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :**

1. Rehabilitasi rumah produksi dan hibah sarana dan prasarana pengolahan yang berstandar mutu
2. Membangun sistem rantai dingin (cool chain system) produk kelautan dan perikanan serta Pembinaan dan pengembangan standar mutu di pusat-pusat perikanan melalui pengembangan rantai dingin
3. Pengembangan sistem logistik ikan daerah untuk menghindari kelangkaan stok produk kelautan dan perikanan di saat paceklik
4. Promosi dan pameran produk olahan secara terintegrasi dan intensif dan ekspor hasil perikanan serta Pengenalan paket teknologi pengolahan hasil perikanan.
5. Pengembangan nilai tambah produk perikanan dan pemberian hibah sarana produksi pengolahan dan pemasaran ikan
6. Pembinaan teknis kualitas produk perikanan secara berkala ke unit pengolahan dan pemasaran di daerah

**b. Program Pengelolaan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

**Hambatan dan Kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :**

1. Konflik pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan laut Kalbar antara pelaku usaha, masyarakat dan stake holder terkait



2. Belum optimalnya pengelolaan kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif
3. Kerusakan ekosistem wilayah pesisir dan laut (rusaknya ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang) Kalbar
4. Upaya mitigasi bencana belum dilakukan secara terus menerus dan cenderung belum menampakkan hasil
5. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian ekosistem pesisir laut. Belum optimalnya peningkatan kapasitas masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
6. Masih lemahnya kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
7. Pelaksanaan program serta kegiatan di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak tepat sasaran
8. SDM pesisir dan pulau-pulau kecil yang masih rendah

**Upaya pemecahan dalam mengantisififikasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :**

1. Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berpedoman pada rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kalbar (RZWP3K)
2. Penetapan kawasan konservasi perairan laut daerah dan Penyelesaian penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif
3. Rehabilitasi dan pembangunan prasarana kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau - pulau kecil dan prasarana di pulau pulau kecil
4. Peningkatan Pemahaman dan Kecintaan terhadap Budaya Kelautan dan Perikanan kepada Masyarakat Kalbar
5. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta Fasilitasi sarana dan prasarana masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
6. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil melalui Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan atau kelompok-kelompok Masyarakat
7. Melibatkan masyarakat dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil
8. Memberikan pendampingan kepada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dalam memperoleh kemudahan akses ilmu pengetahuan serta penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan

### **c. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan**

**Hambatan dan Kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :**

1. Status kelembagaan organisasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang ada saat ini belum memadai dibandingkan dengan ruang lingkup tugas dan fungsi, wilayah kerja yang diawasi berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

2. Kurangnya/minimnya sarana pendukung (sarana transportasi air/ *speed boat dan atau kapal pengawas*) dan kompetensi sumber daya manusia aparatur sipil negara yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (Pengawas Perikanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dan Polisi Khusus Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3k) serta kompetensi khusus lainnya untuk mendukung operasional sarana transportasi air (nakhoda dan Teknisi Mesin (KKM)) serta terbatasnya anggaran kegiatan/ operasional dalam rangka pengawasan.
3. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman dan kesadaran masyarakat serta kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga masih banyaknya pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku (penangkapan ikan tanpa ijin, tidak melaporkan kegiatannya dan tidak dilakukan tidak sesuai perijinannya yang dimiliki perairan laut sampai dengan 12 mil laut Provinsi Kalimantan Barat.
4. Masih kurangnya peran serta masyarakat dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

**Upaya pemecahan dalam mengantisifikasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :**

1. Melakukan kegiatan berupa upaya-upaya yang diperlukan untuk meningkatkan Status kelembagaan organisasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang ada saat ini belum memadai sesuai kebutuhan ruang lingkup tugas dan fungsi, wilayah kerja yang diawasi berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi melalui kegiatan penyusunan dokumen kajian dan analisis akademis, penyusunan analisa jabatan dan beban kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan sebagai bahan pendukung pengajuan usulan pembentukan lembaga pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan setingkat eselon III (bidang).
2. Melakukaan kegiatan upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan sumber daya manusia bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sesuai hasil penyusunan analisa jabatan dan beban kerja sebagai bahan usulan kepada Badan dinas/ badan yang membidangi kepegawaian serta membangun kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dari tingkat pusat, lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota dalam



kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada tingkat pengambilan kebijakan dan tingkat pelaksanaan pengawasan di lapangan.

3. Melakukan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan/ pembinaan kepada masyarakat pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan terkait peraturan perundangan yang berlaku.
4. Melakukan inisiasi pelibatan masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait pengawasan sumberdaya kelautan perikanan melalui pengembangan sistem pengawasan masyarakat dan pembentuk kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) pada tingkat desa/ kelurahan di kabupaten/ kota yang memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan.

**c. Hambatan dan Kendala dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah antara lain :**

1. Keterbatasan Kompetensi/Kualitas sumberdaya manusia (SDM) baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Tenaga Honor di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pejabat struktural belum memahami tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan.

**Upaya pemecahan dalam mengantisifikasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :**

1. Perlu adanya peningkatan kompetensi/ kualitas sumberdaya manusia (SDM) baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Tenaga Honor yang siap kerja membantu kelancaran dan peningkatan kinerja yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.
2. Perlu penekanan pada setiap pejabat struktural untuk memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.



### c. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2022 Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mencapai capaian kinerja pada sasaran strategis ini mempunyai 5 program pokok dan satu program penunjang melalui dana APBD dengan pagu total Anggaran sasaran strategis sebesar Rp **33,332,558,094** dan realisasi anggaran sebesar Rp. **32,639,841,562** atau **97.92 %** adapun rincian realisasi anggaran dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.11.** Realisasi Anggaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	<b>6,788,585,200</b>	<b>6,726,405,313</b>	<b>99.08</b>
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	<b>2,122,043,850</b>	<b>2,095,722,280</b>	<b>98.76</b>
2	Meningkatnya Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	<b>2,225,316,848</b>	<b>2,183,736,400</b>	<b>98.13</b>
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	<b>861,223,600</b>	<b>861,118,700</b>	<b>99.99</b>
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	<b>1,661,144,200</b>	<b>1,629,818,991</b>	<b>98.11</b>
3	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<b>19,674,244,396</b>	<b>19,143,039,878</b>	<b>97.30</b>
<b>Capaian Total</b>			<b>33,332,558,094</b>	<b>32,639,841,562</b>	<b>97.92</b>

Adapun Pagu Dana pada tahun Anggaran 2022 jika secara total Dinas Kelautan dan Perikanan beserta UPTD sebesar Rp.**40.076.536.768** dengan realisasi sebesar **39.275.780.662** atau **98,00%** . Adapun *Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan* Dinas Kelautan dan Perikanan beserta UPTD Pelabuhan Perikanan dan UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut secara lengkap dapat di lihat pada tabel berikut :



**Tabel 3.12.** Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan beserta UPTD Tahun 2022

NO.	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU / ALOKASI DANA (Rp)	REALISASI		
				KEUANGAN		FISIK (%)
				(Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7
<b>TOTAL KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>			<b>40.076.536.768</b>	<b>39.275.780.662</b>	<b>98,00</b>	<b>99,98</b>
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>			<b>33.332.558.094</b>	<b>32.639.095.562</b>	<b>97,92</b>	<b>100,00</b>
I	3.25.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>19.674.244.396</b>	<b>19.143.039.878</b>	<b>97,30</b>	<b>100,00</b>
1	3.25.01.1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>114.441.900</b>	<b>113.998.900</b>	<b>99,61</b>	<b>100,00</b>
a	3.25.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.940.500	9.940.500	100,00	100,00
b	3.25.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	9.327.600	9.327.600	100,00	100,00
c	3.25.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.004.200	7.004.200	100,00	100,00
d	3.25.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6.303.800	6.303.800	100,00	100,00
e	3.25.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.236.000	11.236.000	100,00	100,00
f	3.25.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.629.800	70.186.800	99,37	100,00
2	3.25.01.1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>16.684.839.366</b>	<b>16.247.733.659</b>	<b>97,38</b>	<b>100,00</b>
a	3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.392.874.366	15.974.268.159	97,45	100,00
b	3.25.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	277.044.600	258.545.100	93,32	100,00
c	3.25.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4.907.900	4.907.900	100,00	100,00
d	3.25.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8.054.300	8.054.300	100,00	100,00
e	3.25.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.958.200	1.958.200	100,00	100,00
3	3.25.01.1.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>219.859.600</b>	<b>206.655.575</b>	<b>93,99</b>	<b>100,00</b>
a	3.25.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	161.630.000	148.909.975	92,13	100,00
b	3.25.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	55.320.600	54.836.600	99,13	100,00
c	3.25.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.909.000	2.909.000	100,00	100,00
4	3.25.01.1.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>362.582.000</b>	<b>357.916.670</b>	<b>98,71</b>	<b>100,00</b>
a	3.25.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	9.080.000	7.969.800	87,77	100,00
b	3.25.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	155.464.000	152.280.000	97,95	100,00



NO.	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU / ALOKASI DANA (Rp)	REALISASI		
				KEUANGAN		FISIK (%)
				(Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7
c	3.25.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6.638.000	6.338.000	95,48	100,00
d	3.25.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	178.000.000	177.978.870	99,99	100,00
e	3.25.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	8.400.000	8.400.000	100,00	100,00
f	3.25.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	4.950.000	99,00	100,00
<b>5</b>	<b>3.25.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>737.186.200</b>	<b>729.072.166</b>	<b>98,90</b>	<b>100,00</b>
a	3.25.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.516.600	13.509.100	99,94	100,00
b	3.25.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.635.800	43.635.800	100,00	100,00
c	3.25.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	76.772.900	74.548.000	97,10	100,00
d	3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43.360.700	42.790.700	98,69	100,00
e	3.25.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.180.000	7.920.000	86,27	100,00
f	3.25.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.640.000	16.200.000	91,84	100,00
g	3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	470.878.000	468.266.366	99,45	100,00
h	3.25.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12.202.200	12.202.200	100,00	100,00
i	3.25.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50.000.000	50.000.000	100,00	100,00
<b>6</b>	<b>3.25.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>271.204.300</b>	<b>252.031.000</b>	<b>92,93</b>	<b>100,00</b>
a	3.25.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	271.204.300	252.031.000	92,93	100,00
<b>7</b>	<b>3.25.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.132.303.680</b>	<b>1.090.522.568</b>	<b>96,31</b>	<b>100,00</b>
a	3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	281.272.760	242.414.044	86,18	100,00
b	3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	851.030.920	848.108.524	99,66	100,00
<b>8</b>	<b>3.25.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>151.827.350</b>	<b>145.109.340</b>	<b>95,58</b>	<b>100,00</b>
a	3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	69.389.500	64.087.640	92,36	100,00
b	3.25.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00
c	3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72.437.850	71.021.700	98,05	100,00
d	3.25.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-



NO.	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU / ALOKASI DANA (Rp)	REALISASI		
				KEUANGAN		FISIK (%)
				(Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7
II	3.25.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>	<b>2.225.316.848</b>	<b>2.183.736.400</b>	<b>98,13</b>	<b>100,00</b>
1	3.25.02.1.01	<b>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>	<b>853.208.400</b>	<b>819.152.700</b>	<b>96,01</b>	<b>100,00</b>
a	3.25.02.1.01.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	518.989.500	495.883.100	95,55	100,00
b	3.25.02.1.01.03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	141.587.900	134.540.900	95,02	100,00
c	3.25.02.1.01.04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	192.631.000	188.728.700	97,97	100,00
2	3.25.02.1.03	<b>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil</b>	<b>1.372.108.448</b>	<b>1.364.583.700</b>	<b>99,45</b>	<b>100,00</b>
a	3.25.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.200.305.948	1.196.647.500	99,70	100,00
b	3.25.02.1.03.02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	64.790.300	64.486.300	99,53	100,00
c	3.25.02.1.03.03	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	47.976.500	47.356.500	98,71	100,00
d	3.25.02.1.03.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	59.035.700	56.093.400	95,02	100,00
III	3.25.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>6.788.585.200</b>	<b>6.726.405.313</b>	<b>99,08</b>	<b>100,00</b>
1	3.25.03.1.01	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</b>	<b>6.048.072.900</b>	<b>5.988.766.318</b>	<b>99,02</b>	<b>100,00</b>
a	3.25.03.1.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	436.386.500	435.544.300	99,81	100,00
b	3.25.03.1.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	3.651.897.200	3.620.361.808	99,14	100,00
c	3.25.03.1.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1.959.789.200	1.932.860.210	98,63	100,00
2	3.25.03.1.03	<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>	<b>114.919.300</b>	<b>114.781.000</b>	<b>99,88</b>	<b>100,00</b>

NO.	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU / ALOKASI DANA (Rp)	REALISASI		
				KEUANGAN		FISIK (%)
				(Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7
a	3.25.03.1.03.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	114.919.300	114.781.000	99,88	100,00
<b>3</b>	<b>3.25.03.1.05</b>	<b>Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>48.934.200</b>	<b>48.917.500</b>	<b>99,97</b>	<b>100,00</b>
a	3.25.03.1.05.02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	48.934.200	48.917.500	99,97	100,00
<b>4</b>	<b>3.25.03.1.06</b>	<b>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</b>	<b>468.982.800</b>	<b>466.799.895</b>	<b>99,53</b>	<b>100,00</b>
a	3.25.03.1.06.01	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	156.088.700	155.943.600	99,91	100,00
b	3.25.03.1.06.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	143.683.400	141.651.595	98,59	100,00
c	3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	169.210.700	169.204.700	100,00	100,00
<b>5</b>	<b>3.25.03.1.07</b>	<b>Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>	<b>51.485.100</b>	<b>51.039.100</b>	<b>99,13</b>	<b>100,00</b>
a	3.25.03.1.07.02	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	51.485.100	51.039.100	99,13	100,00
<b>6</b>	<b>3.25.03.1.09</b>	<b>Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>	<b>56.190.900</b>	<b>56.101.500</b>	<b>99,84</b>	<b>100,00</b>
a	3.25.03.1.09.02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	56.190.900	56.101.500	99,84	100,00
<b>IV</b>	<b>3.25.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>2.122.043.850</b>	<b>2.094.976.280</b>	<b>98,72</b>	<b>100,00</b>
<b>1</b>	<b>3.25.04.1.01</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>48.207.700</b>	<b>44.961.700</b>	<b>93,27</b>	<b>100,00</b>
a	3.25.04.1.01.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	48.207.700	44.961.700	93,27	100,00



NO.	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU / ALOKASI DANA (Rp)	REALISASI		
				KEUANGAN		FISIK (%)
				(Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2	3.25.04.1.02	<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing</b>	15.682.400	15.661.500	99,87	100,00
a	3.25.04.1.02.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	15.682.400	15.661.500	99,87	100,00
3	3.25.04.1.05	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>	2.058.153.750	2.034.353.080	98,84	100,00
a	3.25.04.1.05.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	206.426.800	204.613.800	99,12	100,00
b	3.25.04.1.05.03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	541.045.300	533.119.550	98,54	100,00
c	3.25.04.1.05.04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	516.996.600	513.134.600	99,25	100,00
d	3.25.04.1.05.05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	605.008.800	597.877.430	98,82	100,00
e	3.25.04.1.05.06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	84.286.750	83.067.400	98,55	100,00
f	3.25.04.1.05.07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	104.389.500	102.540.300	98,23	100,00
V	3.25.05	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	861.223.600	861.118.700	99,99	100,00
1	3.25.05.1.01	<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>	783.396.400	783.361.500	100,00	100,00
a	3.25.05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	89.203.300	89.201.600	100,00	100,00
b	3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	543.644.900	543.615.700	99,99	100,00
c	3.25.05.1.01.03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	54.830.500	54.828.500	100,00	100,00



NO.	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU / ALOKASI DANA (Rp)	REALISASI		
				KEUANGAN		FISIK (%)
				(Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7
d	3.25.05.1.01.04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	95.717.700	95.715.700	100,00	100,00
2	3.25.05.1.02	<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>77.827.200</b>	<b>77.757.200</b>	<b>99,91</b>	<b>100,00</b>
a	3.25.05.1.02.03	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	77.827.200	77.757.200	99,91	100,00
VI	3.25.06	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>1.661.144.200</b>	<b>1.629.818.991</b>	<b>98,11</b>	<b>100,00</b>
1	3.25.06.1.01	<b>Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>240.518.200</b>	<b>232.488.200</b>	<b>96,66</b>	<b>100,00</b>
a	3.25.06.1.01.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	103.807.300	96.606.300	93,06	100,00
b	3.25.06.1.01.03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	136.710.900	135.881.900	99,39	100,00
2	3.25.06.1.02	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>	<b>580.517.600</b>	<b>564.920.791</b>	<b>97,31</b>	<b>100,00</b>
a	3.25.06.1.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	189.158.800	185.497.800	98,06	100,00
b	3.25.06.1.02.02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	391.358.800	379.422.991	96,95	100,00
3	3.25.06.1.03	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>840.108.400</b>	<b>832.410.000</b>	<b>99,08</b>	<b>100,00</b>



NO.	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU / ALOKASI DANA (Rp)	REALISASI		
				KEUANGAN		FISIK (%)
				(Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7
a	3.25.06.1.03.01	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	266.769.000	266.393.900	99,86	100,00
b	3.25.06.1.03.02	Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	514.027.100	510.753.800	99,36	100,00
c	3.25.06.1.03.03	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	59.312.300	55.262.300	93,17	100,00
<b>UPT PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT</b>			<b>2.691.452.270</b>	<b>2.643.565.634</b>	<b>98,22</b>	<b>99,75</b>
<b>I</b>	<b>3.25.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>2.020.963.020</b>	<b>1.974.025.863</b>	<b>97,68</b>	<b>99,66</b>
<b>1</b>	<b>3 25 01 1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>23.445.700</b>	<b>22.774.756</b>	<b>97,14</b>	<b>100,00</b>
a	3 25 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.785.200	4.514.568	94,34	100,00
b	3 25 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.541.900	6.435.596	98,38	100,00
c	3 25 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.592.800	6.397.328	97,04	100,00
d	3 25 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.525.800	5.427.264	98,22	100,00
<b>2</b>	<b>3 25 01 1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>118.356.100</b>	<b>117.007.940</b>	<b>98,86</b>	<b>100,00</b>
a	3 25 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	105.220.000	104.988.000	99,78	100,00
b	3 25 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.923.600	7.775.184	98,13	100,00
c	3 25 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.212.500	4.244.756	81,43	100,00
<b>3</b>	<b>3 25 01 1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>1.568.500</b>	<b>1.477.092</b>	<b>94,17</b>	<b>100,00</b>
a	3 25 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.568.500	1.477.092	94,17	100,00
<b>4</b>	<b>3 25 01 1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>5.436.600</b>	<b>5.264.544</b>	<b>96,84</b>	<b>100,00</b>
a	3 25 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.718.300	2.632.404	96,84	100,00
b	3 25 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.718.300	2.632.140	96,83	100,00
<b>4</b>	<b>3 25 01 1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>171.488.646</b>	<b>166.658.177</b>	<b>97,18</b>	<b>97,29</b>
a	3 25 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.982.700	34.954.064	99,92	100,00

NO.	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU / ALOKASI DANA (Rp)	REALISASI		
				KEUANGAN		FISIK (%)
				(Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7
b	3 25 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.138.400	33.244.869	94,61	95,00
c	3 25 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.100.000	2.100.000	100,00	100,00
d	3 25 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.015.510	13.107.234	81,84	82,00
e	3 25 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83.252.036	83.252.010	100,00	100,00
<b>5</b>	<b>3 25 01 1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>623.311.490</b>	<b>620.823.688</b>	<b>99,60</b>	<b>100,00</b>
a	3 25 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73.378.340	73.287.016	99,88	100,00
b	3 25 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	400.986.650	399.602.220	99,65	100,00
c	3 25 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	148.946.500	147.934.452	99,32	100,00
<b>6</b>	<b>3 25 01 1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>831.450.184</b>	<b>801.942.834</b>	<b>96,45</b>	<b>100,00</b>
a	3 25 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	202.800.744	173.502.260	85,55	100,00
b	3 25 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	628.649.440	628.440.574	99,97	100,00
<b>7</b>	<b>3 25 01 1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>245.905.800</b>	<b>238.076.832</b>	<b>96,82</b>	<b>100,00</b>
a	3 25 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.098.500	38.147.454	95,13	100,00
b	3 25 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.399.400	39.932.750	89,94	100,00
c	3 25 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	161.407.900	159.996.628	99,13	100,00
<b>II</b>	<b>3 25 04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>670.489.250</b>	<b>669.539.771</b>	<b>99,86</b>	<b>100,00</b>
<b>1</b>	<b>3 25 04 1.05</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>	<b>670.489.250</b>	<b>669.539.771</b>	<b>99,86</b>	<b>100,00</b>
a	3 25 04 1.05 03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	81.360.300	81.170.508	99,77	100,00
b	3 25 04 1.05 05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	589.128.950	588.369.263	99,87	100,00



NO.	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU / ALOKASI DANA (Rp)	REALISASI		
				KEUANGAN		FISIK (%)
				(Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7
<b>UPT PELABUHAN PERIKANAN</b>			<b>4.052.526.404</b>	<b>3.993.119.466</b>	<b>98,53</b>	<b>100,00</b>
<b>I</b>	<b>3.25.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>2.997.496.004</b>	<b>2.954.101.049</b>	<b>98,55</b>	<b>100,00</b>
<b>1</b>	<b>3.25.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>4.296.800</b>	<b>3.518.100</b>	<b>81,88</b>	<b>100,00</b>
a	3.25.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.427.900	2.426.900	99,96	100,00
b	3.25.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	104.600	104.600	100,00	100,00
c	3.25.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.764.300	986.600	55,92	100,00
<b>2</b>	<b>3.25.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>145.782.300</b>	<b>135.079.000</b>	<b>92,66</b>	<b>100,00</b>
a	3.25.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	140.540.000	131.055.000	93,25	100,00
b	3.25.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.242.300	4.024.000	76,76	100,00
<b>3</b>	<b>3.25.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>25.219.600</b>	<b>23.229.305</b>	<b>92,11</b>	<b>100</b>
a	3.25.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20.000.000	19.613.605	98,07	100,00
b	3.25.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.219.600	3.615.700	24,46	100,00
<b>4</b>	<b>3.25.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>45.453.125</b>	<b>44.661.181</b>	<b>98,26</b>	<b>100,00</b>
a	3.25.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25.453.125	25.381.075	99,72	100,00
b	3.25.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	0,00	100,00
c	3.25.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	0,00	100,00
d	3.25.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	19.280.106	96,40	100,00
<b>5</b>	<b>3.25.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>242.452.400</b>	<b>241.709.884</b>	<b>99,69</b>	<b>100,00</b>
a	3.25.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	52.950.100	52.919.200	99,94	100,00
b	3.25.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.883.900	67.858.430	99,96	100,00
c	3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.000.000	27.943.150	99,80	100,00
d	3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.856.400	5.842.200	99,76	100,00
e	3.25.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.000.000	1.815.000	90,75	100,00
f	3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.762.000	85.331.904	99,50	100,00
<b>6</b>	<b>3.25.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>545.999.329</b>	<b>539.751.635</b>	<b>98,86</b>	<b>100,00</b>
a	3.25.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	9.000.000	9.000.000	100,00	100,00
b	3.25.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	536.999.329	530.751.635	98,84	100,00



NO.	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU / ALOKASI DANA (Rp)	REALISASI		
				KEUANGAN		FISIK (%)
				(Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7
<b>7</b>	<b>3.25.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.563.283.250</b>	<b>1.547.419.594</b>	<b>98,99</b>	<b>100,00</b>
a	3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	120.000	120.000	100,00	100,00
b	3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	431.941.850	417.026.668	96,55	100,00
c	3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.131.221.400	1.130.272.926	99,92	100,00
<b>8</b>	<b>3.25.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>425.009.200</b>	<b>418.732.350</b>	<b>98,52</b>	<b>100,00</b>
a	3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.008.000	69.482.350	92,63	100,00
b	3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	204.001.200	203.415.500	99,71	100,00
c	3.25.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	136.000.000	135.834.500	99,88	100,00
d	3.25.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00
<b>II</b>	<b>3.25.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>1.055.030.400</b>	<b>1.039.018.417</b>	<b>98,48</b>	<b>100,00</b>
<b>1</b>	<b>3.25.03.1.06</b>	<b>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</b>	<b>1.055.030.400</b>	<b>1.039.018.417</b>	<b>98,48</b>	<b>100,00</b>
a	3.25.03.1.06.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	805.000.000	798.084.117	99,14	100,00
b	3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	250.030.400	240.934.300	96,36	100,00





## B A B. IV P E N U T U P

### d. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tlanakan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun 2022 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat menetapkan sebanyak 2 tujuan, 3 sasaran dengan 4 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan terdiri dari satu indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 11.49% (kategori Baik)
- Sasaran Meningkatnya Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan terdiri dari satu indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 107.73 % (kategori Baik)
- Sasaran Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari dua indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 105.36 % (kategori Baik)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka

mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp **33,332,558,094** dan realisasi anggaran sebesar Rp. **32,639,841,562** atau **98.56** dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2023 serapan anggaran sebesar 98.56% dengan kinerja 107.48 dan nilai efisiensi anggaran sebesar 8.92%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Provinsi Kalimantan Barat.

Pontianak, Januari 2022

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Kalimantan Barat

Ir. MUHAMMAD MUNSIF/ MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630710 198903 1 023



## Lampiran 1.

## FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

## FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KALBAR

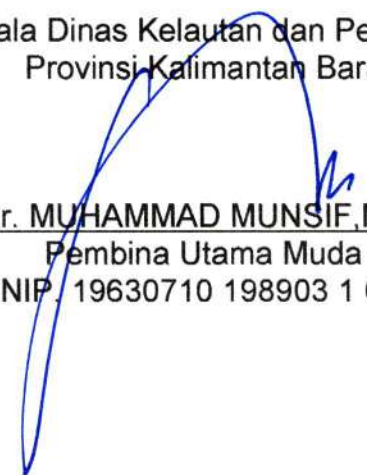
TAHUN ANGGARAN : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan (Ton)	233,680.89	260,536.64	111.49
2	Meningkatnya Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan	Indeks Harga yang diterima Subsektor Perikanan (%)	106	114.19	107.73
3	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai RB Dinas Kelautan dan Perikanan	80,00 (BB)	86,95 (A)	108.69
		Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	79 (BB)	80 (A)	102.03
Capaian					107.48

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2022 : Rp. 33,332,558,094

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2022 : Rp. 32,639,841,562

Pontianak, Januari 2022

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Kalimantan Barat


Ir. MUHAMMAD MUNSIF, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630710 198903 1 023



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jalan Sutan Syahrir No. 16 Kotak Pos 1016 Telp. (0561) 732521 Fax. (0561) 766073

Website : <http://dislautkan.kalbarprov.go.id>

e-mail : [dkp@kalbarprov.go.id](mailto:dkp@kalbarprov.go.id)

**PONTIANAK**

Kode Pos : 78116 A

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. HERTI HERAWATI, MMA  
Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum  
Jabatan : Gubernur Kalimantan Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, 02 September 2022

Pihak Kedua,  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Pihak Pertama,  
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN  
PERIKANAN PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT

  
H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum

  
Ir. HERTI HERAWATI, MMA  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680725 199303 2 003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	233,681
2.	Meningkatnya Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan	Indeks Harga yang Diterima Subsektor Perikanan ( % )	106
3.	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	80,00 (BB)
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	79,00 (BB)

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 19.674.244.396	APBD
2.	Program Pengelolaan Kelautan. Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Rp. 2.225.316.848	APBD
3.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 6.788.585.200	APBD
4.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 2.122.043.850	APBD
5.	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Rp. 861.223.600	APBD
6.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 1.661.144.200	APBD
	<b>Total</b>	<b>Rp. 33.332.558.094</b>	

	<b>Program</b>		<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp.	580.000.000	APBN / DK
2.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp.	320.520.000	APBN / DK
3.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp.	415.471.000	APBN / DK
4.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp.	378.825.000	APBN / TP
5.	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Rp.	285.150.000	APBN / DK
6.	Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Rp.	175.622.000	APBN / DK
7.	Program Pengelolaan Ruang Laut	Rp.	184.000.000	APBN / DK
	<b>Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.339.558.000</b>	

Pihak Kedua.  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

  
H. SUTARMIDJI. SH. M.Hum

Pihak Pertama.  
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN  
PERIKANAN PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT

  
Ir. HERTI HERAWATI. MMA  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680725 199303 2 003